

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia sebagai upaya memperkuat landasan perekonomian nasional. Desa dipandang sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam pengembangan ekonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berperan sebagai entitas usaha desa yang bertugas mengelola aset, potensi lokal, serta menyediakan layanan ekonomi kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperluas lapangan kerja bagi warga (Kementerian Desa, 2020)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas ekonomi yang dimiliki oleh desa dan dibentuk untuk mengelola potensi serta sumber daya lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Ridlwan, 2015). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMDes memerlukan pengambilan keputusan investasi yang tepat, karena keputusan tersebut berpengaruh terhadap arah pengembangan usaha, alokasi modal, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi desa (Makisanti et al., 2022). Oleh karena itu, agar keputusan investasi dapat diambil secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan informasi akuntansi yang relevan, andal, serta tersedia tepat waktu sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan (Rochmatulaili & Jaka Dwi Saputra, 2020).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BUMDes tidak hanya memerlukan modal fisik berupa dana dan aset, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, memiliki peran yang sangat krusial. Kompetensi pengelola akan memengaruhi keberlangsungan operasional BUMDes, kualitas penyusunan laporan, serta proses pengambilan keputusan investasi. Seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha BUMDes, kemampuan pengelola dalam memahami serta memanfaatkan informasi akuntansi menjadi semakin esensial (Sari, D. P., & Wulandari, 2020)

Pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, antara lain tingkat pengetahuan akuntansi pengelola BUMDes, kompetensi aparatur desa, serta efektivitas pengawasan internal. Pengetahuan akuntansi diperlukan agar pengelola mampu memahami dan menggunakan informasi keuangan secara tepat, kompetensi aparatur berperan dalam kemampuan teknis dan manajerial dalam penyusunan laporan keuangan serta evaluasi keputusan investasi, sementara pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan dapat dipercaya (Indrawan & Dewi, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menjadi rujukan dan landasan bagi penelitian ini. (Rinaldi, 2019), mengkaji pengaruh pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki peranan yang signifikan dalam pemanfaatan informasi akuntansi.

Tabel 1. 1
Data Jumlah BUMDes di Kota Lhokseumawe 2023 – 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes		
			2024	2025	2026
1.	Muara Dua	17	17	17	17
2.	Banda Sakti	18	18	18	18
3.	Blang Mangat	22	19	19	21
4.	Muara Satu	11	11	11	11
	Jumlah	68	65	65	67

Sumber data: (DPMG Kota Lhokseumawe, 2026)

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang cukup aktif dalam mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes. Berdasarkan laporan DPMG Kota Lhokseumawe (2026), sebanyak 67 BUMDes telah terbentuk, namun hanya beberapa di antaranya yang benar-benar melakukan aktivitas usaha secara berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi pada BUMDes belum sepenuhnya optimal. Sebagian BUMDes masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat pengetahuan akuntansi pengelola, yang menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Azizah & Sahrir, 2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan pelaku usaha, di mana keterbatasan pemahaman akuntansi dapat

menghambat pemanfaatan informasi akuntansi secara efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.

Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi masih menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan BUMDes, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan investasi (Polutu et al., 2022). Di samping itu, permasalahan lain yang turut memengaruhi pemanfaatan informasi akuntansi adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal yang tidak berjalan secara efektif berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, menurunkan tingkat transparansi, serta meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes (Rahmawati et al., 2023).

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi pengelolaan BUMDes yang diharapkan dan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi semestinya didukung oleh tingkat pengetahuan akuntansi yang memadai, kompetensi aparatur yang profesional, serta sistem pengawasan internal yang berjalan secara efektif. Akan tetapi, temuan empiris dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan pada aspek-aspek tersebut, sehingga pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi belum terlaksana secara optimal (Sagala & Siregar, 2023).

Walaupun sejumlah penelitian telah membahas pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, serta sistem informasi terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa, kajian yang secara spesifik menguji pengaruh pengetahuan akuntansi, kompetensi aparatur desa, dan pengawasan internal terhadap pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada desa-desa di wilayah lain dan belum secara khusus mengkaji konteks Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menganalisis secara integratif pengaruh pengetahuan akuntansi, kompetensi aparatur desa, pengawasan internal dan penggunaan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan investasi pada BUMDes di Kota Lhokseumawe dengan mempertimbangkan kekhasan konteks lokal. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai determinan pengambilan keputusan investasi yang berbasis informasi akuntansi, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akademik terkait pengelolaan BUMDes. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengelola BUMDes, aparatur desa, serta pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kompetensi, dan penyempurnaan sistem pengawasan internal guna menunjang kualitas keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Kompetensi Aparatur Desa, Pengendalian Internal dan Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada BUMDes (Studi pada BUMDes**

di Kota Lhokseumawe)” Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi yang relevan bagi pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Akuntansi berpengaruh Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.
2. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh dalam Pengambilan Keputusan Investasi.
4. Apakah Penggunaan Informasi Akuntansi berpengaruh dalam Pengambilan Pengambilan Keputusan Investasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas,maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Investasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun pembanding bagi studi-studi berikutnya yang menelaah Pengetahuan Akuntansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pengawasan Internal terhadap Pemanfaatan Informasi Akuntansi dalam proses Pengambilan Keputusan Investasi pada BUMDes.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan landasan teoretis, terutama yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan investasi.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan masukan bagi aparatur desa dan pengelola BUMDes di Kota Lhokseumawe untuk mengevaluasi serta memperkuat

pengetahuan akuntansi, kompetensi aparatur, dan sistem pengawasan internal.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan kajian lanjutan mengenai tata kelola BUMDes.